

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PEMBERDAYAAN PURNA PEKERJA MIGRAN

Slamet Mulyana dan Meria Octavianti

Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad

Email: slamet.mulyana@unpad.ac.id; meria.octavianti@unpad.ac.id

Abstract

The empowerment of Indonesian post-migrant workers (Purna PMI) is carried out continuously to reduce the numbers of Indonesians working abroad. Aside from programs of related agencies, the government also involves direct community participation. This study sought to describe the participatory development communication (PDC) of Forum Purna PMI in Desa Celak, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat. This study used case study approach to provide a complete and in-depth view of the subject under study. The nature of the subject was multi-source, with key informants representing bureaucrats, academics, community leaders and post-migrant workers. Data was collected through interviews, observations and literature study. The results showed that community involvement was an important factor in realizing community development communication. Direct involvement in the planning and implementation of empowerment programs in the village fosters the community awareness to build their village, to get a job, to improve their welfare and to not leave their village in order to be a migrant worker.

Keywords: participation, development communication, community empowerment

Abstrak

Upaya pemberdayaan purna pekerja migran Indonesia (Purna PMI) terus dilakukan secara berkesinambungan, untuk menekan tingginya angka migrasi pekerja migran ke luar negeri. Upaya itu selain dilakukan pemerintah, melalui intervensi berbagai program dari dinas/instansi terkait, juga melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya komunikasi pembangunan partisipatif yang dilakukan melalui wadah Forum Purna PMI di Desa Celak Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat.

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus sehingga bisa memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti. Subjek penelitian bersifat multi sources, dengan informan kunci yang mewakili birokrat, akademisi, dan tokoh masyarakat, dan purna PMI. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting untuk mewujudkan komunikasi pembangunan masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan di desa, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membangun desa, mendapat pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan tidak meninggalkan desa untuk menjadi pekerja migran di luar negeri.

Kata kunci: partisipasi, komunikasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan semangat reformasi dan otonomi, fokus pembangunan tidak lagi berpedoman pada kebijakan *top down planing* melainkan sudah beralih ke kebijakan *bottom up planning*. Masyarakat bukan lagi objek pembangunan melainkan menjadi subjek pembangunan. Mengatasi permasalahan pembangunan masyarakat yang semakin kompleks, maka diperlukan suatu pendekatan yang memungkinkan masyarakat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya sendiri, untuk itu diperlukan suatu bentuk komunikasi yang mengkondisikan masyarakat bebas berpendapat, berekspresi dan mengungkapkan diri secara terbuka satu sama lainnya (Sulistyowati et al. 2005). Mulyana (2007) menegaskan bahwa komunikasi pembangunan yang harus dikembangkan adalah komunikasi pembangunan yang berorientasi kerakyatan atau humanistik yaitu menuntut dialog antara pihak-pihak yang punya gagasan pembangunan dengan subjek pembangunan yaitu rakyat dan pemerintah.

Dalam paradigma baru komunikasi pembangunan, pembangunan masyarakat seharusnya berorientasi pada lapisan masyarakat tingkat paling bawah, bersifat desentralisasi, serta mengedepankan partisipasi dan pengembangan diri masyarakat setempat. Pembangunan harus dipandang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat bisa menentukan sendiri

kebutuhannya sesuai dengan *need and assessment*-nya, bukan sebaliknya diatur pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat berpartisipasi langsung sehingga mampu menggali permasalahan, mengidentifikasi, merencanakan sekaligus mencari pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya..

Dalam pembangunan desa, partisipasi masyarakat merupakan syarat keberhasilan pembangunan desa, sebagaimana dikemukakan Ndraha (1981: 17) bahwa "Pembangunan desa adalah pembangunan yang sepanjang prosesnya masyarakat desa yang bersangkutan diharapkan berpartisipasi aktif dan dikelola di tingkat desa". Pernyataan itu sejalan dengan hakekat otonomi di desa seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pasal 1 ayat (8) yang menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya pasal 78 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Terakhir pada ayat (3)

pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Ada banyak pandangan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, salah satunya dikemukakan oleh Davis (dalam Ndraha, 1981:87), yaitu *participation is defined as mental and emotional involvement of person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them* (partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang kedalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta bertanggung jawab terhadap usaha yang dilaksanakan untuk kelompoknya). Berdasarkan pendapat tersebut menurut Ndraha (1981: 87-88) ada tiga hal penting yang tercakup di dalamnya yaitu :

- 1) Titik berat partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional. Kehadiran secara pribadi/ fisik di dalam suatu kelompok tanpa keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi.
- 2) Kesiediaan untuk memberi kontribusi, tergerak. Wujud kontribusi di dalam pembangunan ada bermacam-macam. Misalnya : barang, uang, bahan, jasa, buah pikiran, keterampilan dan sebagainya.
- 3) Kesiediaan untuk turut bertanggung jawab dari anggota terhadap aktivitas

yang dilaksanakan di dalam kelompoknya.

Fokus penelitian ini berkenaan dengan aktivitas komunikasi pembangunan partisipatif dalam pemberdayaan purna pekerja migran Indonesia, dengan mengambil lokasi di Desa Celak. Kecamatan Gununghalu adalah salah satu wilayah di Kabupaten Bandung Barat yang dikenal sebagai sending area (wilayah pengirim buruh migran). Setiap tahunnya banyak penduduk di kecamatan ini, terutama dari Desa Celak, yang berangkat menjadi buruh migran. Daerah tujuan mereka terutama kawasan Timur Tengah (Negara-negara Arab). Di Kecamatan Gununghalu sudah terbentuk Forum Purna Pekerja Migran Indonesia, yang merupakan wadah untuk para purna PMI dengan aktivitas utama menangani berbagai permasalahan yang dialami buruh migran dan mantan buruh migran, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi mereka.

Menurut penuturan Hj. Noneng Syamsiah, selaku Ketua Forum PMI, saat ini di Kecamatan Gununghalu terdapat sekitar 4000an anggota forum dan yang aktif sebanyak 1500 orang. Forum ini sudah dibentuk di Kecamatan Gununghalu sejak tahun 2012, dan sejak itu terus berkembang. Mereka mempunyai beberapa unit usaha membuat makanan olahan sesuai potensi yang ada di wilayahnya, seperti keripik singkong, keripik pisang, dan wajit. Pada tahun 2013

dan 2015, forum ini mendapat apresiasi dan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat atas segala aktivitas yang sudah dilakukan.

Saat ini, Desa Celak di Kecamatan Gununghalu bersama Desa Saguling di Kecamatan Saguling menjadi wilayah percontohan di Kabupaten Bandung Barat untuk program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk program Desmigratif, di Desa Celak terdapat 2 orang tenaga pendamping untuk membina dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekitar 60 purna PMI yang mempunyai usaha mandiri.

Tujuan dibentuknya Forum Purna PMI adalah untuk pemberdayaan masyarakat purna PMI, sehingga purna PMI ini punya rintisan wirausaha di tempat domisilinya dan mereka tidak berangkat lagi ke luar negeri. Menjadi pekerja migran di luar negeri itu banyak masalah dan resikonya, dari mulai masalah di tempat asal sampai masalah di tempat tujuan. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Forum Purna PMI dan keberhasilannya selama ini, Hj. Noneng sering diminta menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan untuk rintisan wirausaha yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Sejalan dengan tujuan pertama, pembentukan

forum purna PMI juga dimaksudkan untuk mengembangkan wadah wirausaha mandiri yang mampu mengangkat produk unggulan daerah sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

Berdasarkan pemaparan tersebut, secara lebih rinci penelitian ini mencoba mendeskripsikan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desanya khususnya yang melibatkan purna PMI. Selain itu juga mendeskripsikan pentingnya keberadaan tokoh msyarakat sebagai *opinion leader* yang menjadi panutan, dan pentingnya *political will* dari pimpinan daerah serta pimpinan dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan pembanhunan di lapangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan karena tujuan dari penelitian ini menghendaki adanya pembahasan yang holistik, sistemik, dan mengungkapkan makna dibalik fakta empiris mengenai komunikasi pembangunan partisipatif dalam pemberdayaan purna PMI.

Metode studi kasus digunakan dengan mempertimbangkan relevansinya untuk menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti, yaitu komunikasi pembangunan partisipatif dalam pemberdayaan purna PMI. Dalam studi kasus,

peneliti mempelajari sebanyak mungkin data mengenai seorang individu, kelompok atau suatu kejadian, peneliti bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti (Mulyana, 2001:201). Studi kasus merupakan penelitian yang mempelajari secara intensif atau mendalam satu anggota dari kelompok sasaran suatu subjek penelitian.

Pada penelitian ini yang menjadi narasumber atau key informan dan dipilih secara purposif adalah pihak-pihak yang memiliki kompetensi sesuai focus penelitian. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dengan key informan sebanyak 5 orang baik tokoh masyarakat maupun narasumber dari dinas/instansi terkait. Selain itu juga, dilakukan peninjauan ulang dan penggunaan dokumentasi dengan menyandarkan pada konsep konsep teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya.

Lokasi penelitian adalah Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat khususnya di Desa Celak, yang ditetapkan secara purposif sebagai wilayah kasus. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung yang peneliti lakukan. Selain itu juga, dilakukan peninjauan ulang dan penggunaan dokumentasi dengan menyandarkan pada konsep konsep teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. KAJIAN PUSTAKA

Komunikasi dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berhubungan erat. Peranan komunikasi pembangunan telah banyak dibicarakan oleh para ahli, pada umumnya mereka sepakat bahwa komunikasi mempunyai andil penting dalam pembangunan. Everett M. Rogers (1985) menyatakan bahwa, secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa. Dia juga menyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari perubahan social pada suatu bangsa. Perubahan yang dikehendaki dalam pembangunan tentunya perubahan ke arah yang lebih baik atau lebih maju dari sebelumnya. Oleh karena itu peranan komunikasi dalam pembangunan harus dikaitkan dengan arah perubahan tersebut. Artinya kegiatan komunikasi harus mampu mengantisipasi gerak pembangunan.

Sementara itu, Inayatullah (dalam Nasution, 2001:28) mengungkapkan bahwa pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih

terhadap diri mereka sendiri individu-individu. Sedangkan menurut Riyadi (dalam Mardikanto, 2010:3) pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Dissyanake (dalam Sumadi,2007: 58) mendefinisikan pembangunan sebagai proses perubahan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari seluruh atau mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan alam dan kultural tempat mereka berada dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini dan menjadikan mereka penentu dari tujuan mereka sendiri. Pada sisi lain, Katz (dalam Huraerah, 2008:12) mengartikan pembangunan sebagai proses yang lebih luas dari masyarakat terhadap suatu keadaan kehidupan yang kurang bernilai kepada keadaan yang lebih bernilai.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakekat pembangunan adalah suatu proses perubahan nilai-nilai dalam kehidupan melalui proses-proses yang terencana dan berkesinambungan oleh pemerintah bersama masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan, menurut Rogers (1985) adalah suatu perubahan sosial yang bersifat partisipatori secara luas untuk meningkatkan keadaan sosial dan materi (termasuk keadilan, kebebasan, dan kualitas mayoritas masyarakat yang tinggi) melalui perolehan pada control yang lebih besar terhadap lingkungannya. Dalam tataran ini, Rogers telah memberikan sebuah pendekatan baru pada masanya dalam pembangunan dengan memasukkan partisipasi yang luas. Ini mengisyaratkan bahwa keterlibatan masyarakat bukan sekedar menikmati hasil pembangunan tapi ikut secara aktif dalam proses-proses pembangunan.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada tersedianya prasarana material tetapi juga bergantung pada tersedianya prasarana moral yaitu peraturan tata tertib dan sikap mental serta adat kebiasaan yang bersifat positif dan favourable yaitu berupa pandangan yang dapat sejalan dan memberikan dorongan kepada berhasilnya suatu pembangunan. Oleh karena itu, usaha untuk mengubah sikap mental masyarakat dari sikap yang cenderung kurang mendukung sehingga dapat menerima konsepsi-konsepsi pandangan yang bersifat dinamis dan maju perlu dilaksanakan. Keterlibatan berbagai pihak, baik dari manusia penggeraknya dengan sarana dan prasarana yang tersedia seperti potensi alam nilai budaya dan juga kesediaan masyarakat

yang ingin dibangun. Sebaliknya kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan potensi-potensi yang tersedia akan mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih aktif dalam kegiatan pembangunan.

Dalam perspektif ini, pembangunan masyarakat adalah suatu gagasan perubahan dari bawah (bottom up). Gagasan ini menghargai pengetahuan, keterampilan, kebudayaan, sumber daya, dan proses-proses lokal sebagai sesuatu yang penting. Pendekatan bottom up dan partisipasi merupakan prinsip fundamental dalam pembangunan masyarakat. Formulasi keduanya menempatkan komunikasi pada posisi sentral untuk menggerakkan proses-proses yang berlangsung. Diaz Bordinave mencatat bahwa dalam pendekatan ini, partisipasi seringkali diharapkan secara langsung oleh sumber dan agen perubahan. Dalam pendekatan Bottom up orang-orang dibujuk untuk mengambil bagian di dalam aktivitas mandiri, tetapi penyelesaian permasalahan lokal mendasar dipilih oleh agen pembangunan eksternal. Partisipasi orang-orang diarahkan. Padahal sasaran partisipasi tidak hanya bersifat pragmatis tapi juga lebih kepada kemandirian masyarakat. (Melkote and Steeves, 2006)

Komunikasi bagi pembangunan adalah sebuah desain dan penggunaan yang sistematis dari aktivitas partisipatif,

pendekatan komunikasi, metode dan media untuk berbagi informasi dan pengetahuan diantara para-pihak (stakeholders) dalam sebuah proses pembangunan untuk memastikan saling pengertian dan konsensus yang menuju kepada tindakan. (Anyaeibunam, et al., 2004). Peran komunikasi dan partisipasi dalam pembangunan, diantaranya adalah (a) Pemberdayaan masyarakat, (b) Pemahaman bersama dan kesepakatan untuk berbuat, (c) Melatih kelompok interest di masyarakat, dan (d) Menciptakan kebijakan yang mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Komunikasi Pembangunan Partisipatif, komunikasi pembangunan partisipatif Komunikasi pembangunan partisipatif ialah, desain yang sistematis dan penggunaan kegiatan partisipasi, pendekatan komunikasi, metode, dan media untuk berbagi informasi dan pengetahuan kepada semua stakeholder dalam proses pembangunan untuk memastikan adanya saling pengertian yang mengarah pada sebuah tindakan. Komunikasi pembangunan partisipatif bertujuan untuk, memfasilitasi partisipasi masyarakat pada semua tingkat pembangunan. Selain itu, dapat membantu mengidentifikasi dan menerapkan kebijakan (Anyaeibunam, 2004 : 10).

Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran, emosi maupun tindakan yang

mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya mencapai tujuan yang ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut (Adams, 1995). Lebih lanjut Melkote dan Steeves (2006) menyatakan *community participation means facilitating the aktif involvement of different community groups, together with the other stakeholders involved, and the many development and research agents working with the community and decision makers*. Sehingga partisipasi yang dimaksudkan tidak hanya pada individu, tapi juga komunitas dan kelompok-kelompok komunitas yang ada di dalam masyarakat.

Sejalan dengan pendapat itu Ndraha (1981:108), mengemukakan, bahwa : partisipasi dilakukan baik dengan pola profesional maupun parsial. Partisipasi profesional, yang dilakukan sepanjang proses pembangunan, mulai fase penerimaan informasi, fase pemberian tanggapan terhadap informasi, fase perencanaan pembangunan, fase pelaksanaan pembangunan, fase penerimaan kembali hasil pembangunan, dan fase penilaian pembangunan. Sedangkan pada partisipasi parsial, keikutsertaan masyarakat hanya dilakukakan pada satu atau beberapa fase saja. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bantuan pembangunan desa, merupakan salah satu masukan yang tumbuh dan berkembang dalam suasana kehidupan

masyarakat, oleh karena ada interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Lebih lanjut Houlton (1974:14-15) mengemukakan, bahwa Partisipasi adalah *social relations* yaitu suatu gejala keadaan sosiologi dimana seseorang merasakan bersama-sama dengan orang lain sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial... Kesadaran manusia akan timbul jika dimotivasi oleh kebutuhan untuk berkelompok atas dasar kesenangan atau sesuatu yang dirasakan berguna, atas dasar persahabatan dan saling kasih sayang atau saling simpati...dalam kelompok tadi seseorang akan menemukan identitas pribadi karena bersama-sama dengan orang lain ia akan merasakan setiap kebutuhan kelompok maupun anggotanya atas dasar komunikasi dan kegiatan yang dijalankan bersama.

Berlangsungnya partisipasi masyarakat merupakan kegiatan antara dua pihak, yakni pihak yang dibangkitkan untuk berpartisipasi yaitu masyarakat dan pihak yang membangkitkan yaitu pemerintah, jadi bukan kegiatan yang sepihak saja. Dalam kaitannya dengan pembangunan desa, maka pihak yang memegang peranan dalam membangkitkan partisipasi masyarakat adalah pemerintah desa. Dalam upaya membangkitkan partisipasi masyarakat, komunikasi mempunyai peranan penting dalam memelihara hubungan secara timbal balik, di satu pihak pemerintah menyampaikan

kebijakan kepada masyarakat, sedangkan di lain pihak masyarakat menyampaikan gagasan, keinginan atau kebutuhannya kepada pemerintah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) *Purna PMI Desa Celak: Selayang Pandang*

Desa Celak adalah salah satu desa di Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, yang mempunyai luas wilayah 9,14 km². Berdasarkan data monografi desa Tahun 2017, di Desa Celak terdapat 2294 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk Desa Celak adalah 9158 jiwa, yang terdiri dari 4860 laki-laki dan 4298 perempuan, yang tersebar di 19 Rukun Warga (RW) dan 55 Rukun Tetangga (RT).

Desa ini dikenal sebagai *sending area* pekerja migran dimana banyak sekali warga desa yang berangkat ke luar negeri, khususnya ke Negara-negara di kawasan Timur Tengah (Negara-negara Arab) untuk menjadi pembantu rumah tangga. Alasan mereka memilih tujuan ke wilayah Arab adalah alasan kesamaan agama (keyakinan). Dalam persepsi mereka, majikan di sana pasti beragama Islam; agama yang sama dengan mereka. Jenis pekerjaan warga Desa Celak di Negara tujuan umumnya adalah pembantu rumah tangga atau paling tinggi supir dikarenakan mereka berangkat tanpa memiliki

keterampilan yang memadai dan pendidikan rendah. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Mulyana (2015) tentang pekerja migran di Indramayu, yang menyatakan bahwa pada umumnya pekerja migran yang berangkat ke luar negeri didasari kondisi keterpaksaan karena dorongan kesulitan ekonomi, tingkat pendidikan yang sangat rendah, serta tidak dibekali keterampilan yang memadai yang menyebabkan mereka hanya bisa memasuki sector-sektor pekerjaan informal di Negara tujuan.

Tingginya angkat pekerja migran dikarenakan hampir di setiap rumah tangga (KK) di desa ini yang akan, sedang atau pernah (purna) pekerja migran. Sampai saat ini, motif menjadi buruh migran masih tinggi, dan motif itu sudah menjadi tradisi yang turun temurun semenjak tahun 1980-an khususnya dari pengalaman dan ajakan keluarga atau saudara, tetangga, dan teman yang sudah menjadi buruh migran dan memperoleh kesuksesan.

Masyarakat memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat menjadi buruh migran yang sukses karena dapat menghasilkan pendapatan dan tabungan yang lebih besar dibandingkan menjadi petani, peternak, pedagang serta buruh di tempat asal mereka sendiri. Masyarakat desa menjadi buruh migran selaian karena turun temurun, juga karena kuatnya tawaran dari para penyalur

tenaga kerja (sponsor) yang langsung datang ke desa dan pemerintah desa cenderung membiarkan serta mendukung. Menurut de Haan dan Rogaly (2010) mobilitas buruh dipengaruhi oleh perubahan daerah dan desa yang spesifik dan kompleks untuk memenuhi tuntutan kepentingan modal dan kebutuhan tenaga kerja.

2. Partisipasi Purna PMI dalam Pembangunan Desa

Secara umum, partisipasi masyarakat di Desa Celak dalam pembangunan desanya sangat baik dibandingkan masyarakat di desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan Gununghalu. Data monografi Desa Celak tahun 2017 menunjukkan terdapat 95 kader PKK, 60 kader Posyandu, 60 pengurus Karang Taruna. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing program atau organisasi kemasyarakatan tersebut.

Di Kecamatan Gununghalu sudah terbentuk Forum Purna Pekerja Migran Indonesia (Forum Purna PMI), yang merupakan wadah untuk para purna PMI dengan aktivitas utama menangani berbagai permasalahan yang dialami buruh migran dan mantan buruh migran, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi mereka.

Menurut penuturan Hj. Noneng Syamsiah, selaku Ketua Forum PMI, saat ini di Kecamatan Gununghalu terdapat sekitar 4000an anggota forum dan yang aktif sebanyak 1500 orang. Forum ini sudah dibentuk di Desa Celak Kecamatan Gununghalu sejak tahun 2012, dan sejak itu terus berkembang. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok, bahkan sebagian di antaranya perseorangan, dan masing-masing mempunyai beberapa unit usaha membuat makanan olahan sesuai potensi yang ada di wilayahnya, seperti keripik singkong, keripik pisang, dan wajit. Selain itu, beberapa yang lain mempunyai usaha yang pertanian, perdagangan, salon, catering, dan lain-lain. Pada tahun 2013 dan 2015, forum ini mendapat apresiasi dan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat atas segala aktivitas yang sudah dilakukan.

Peran masyarakat, khususnya purna PMI dalam pembangunan desa membedakan jenis kelamin/ Laki-laki dan perempuan semuanya terlibat dalam berbagai aktivitas yang berbeda. Laki-laki banyak terlibat dalam aktivitas yang lebih menuntut tenaga seperti pertanian, perkebunan atau perdagangan. Sementara perempuan banyak terlibat dalam usaha yang dilakukan di rumah seperti membuat makanan olahan, salon atau catering. Hal ini sejalan dengan pemikiran Dhak (2014), bahwa kesetaraan dan

pemberdayaan perempuan adalah faktor paling penting untuk mencapai tujuan dan pembuatan kebijakan, khususnya dalam pembangunan di desa.

Kegiatan usaha ekonomi masyarakat masih bersifat individual dan kelompok kecil, tidak dalam bentuk komunitas usaha yang menyatukan berbagai kelompok dalam satu kesatuan untuk bekerjasama saling mendukung dan menguatkan. Masyarakat memiliki inisiatif untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi daripada pemerintah desa yang belum memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sebagian purna PMI sebenarnya memiliki pengalaman sukses yaitu selama kurun waktu antara dua sampai lima tahun bisa menabung dan pulang ke desa membeli tanah dan rumah, sawah, ladang dan kebun, membuka usaha seperti jualan warung klontongan, beternak ayam, kambing, dan sapi. Walaupun demikian masih terdapat purna PMI yang masih berorientasi konsumtif dalam menyalurkan tabungan hasil kerja dengan membeli tanah, rumah, kendaraan dan hidup boros, serta tidak melakukan kegiatan produktif usaha ekonomi. Hal lain yang menonjol dalam temuan penelitian, jarang purna PMI yang menginvestasikan tabungannya untuk pendidikan anak dan keluarga ke jenjang yang lebih tinggi, supaya dapat merubah atau meningkatkan orientasi

dalam mencari pekerjaan. Hal ini sejalan dengan kondisi umum masyarakat di Desa Celak yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya mendapat kegiatan pemberdayaan ekonomi di desa secara terprogram dan berkesinambungan.

Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat tidak memiliki kesempatan, kemampuan dan keberanian untuk beraspirasi mengemukakan pendapat, mengusulkan program pembangunan desa dan pemberdayaan. Menurut Subianto (2006) pembelanjaan remitan lebih besar di luar wilayah desa asal buruh migran, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah terutama dalam menumbuhkan entrepreneurship agar pemanfaatan remitan dapat digunakan untuk kegiatan produktif dan investasi, bukan konsumtif semata. Memperhatikan potensi yang dimiliki seperti sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya buatan untuk dibuat strategi pemanfaatan remitan buruh migran agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

Masyarakat atau kelompok warga purna PMI belum secara optimal melakukan usulan dan kontrol kepada pemerintah desa untuk dapat memprioritaskan pemberdayaan ekonomi masyarakat beserta anggarannya sebagai program pembangunan sehingga

dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Pentingnya *Opinion Leader*

Salah satu faktor yang menguntungkan dan mempercepat komunikasi pembangunan partisipatif di Desa Celak Kecamatan Gununghalu adalah keberadaan beberapa tokoh masyarakat sebagai *opinion leader*. Mereka adalah beberapa orang warga, khususnya purna PMI, yang mempunyai kreativitas, inovasi dan kepedulian dengan berbagai permasalahan warga setempat dan berupaya mencari solusi untuk mengatasinya. Mereka kemudian berupaya untuk mengkoordinir purna PMI yang lain untuk melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat berkaitan dengan kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hj. Noneng Syamsiah dengan beberapa purna PMI yang lain membentuk wadah yang diberi nama Forum Purna Pekerja Migran Indonesia (forum Purna PMI) Tujuan dibentuknya Forum Purna PMI adalah untuk pemberdayaan masyarakat purna PMI, sehingga purna PMI ini punya rintisan wirausaha di tempat domisilinya dan mereka tidak berangkat lagi ke luar negeri. Menjadi pekerja migran di luar negeri itu banyak masalah dan resikonya, dari mulai masalah di tempat asal sampai masalah di tempat tujuan.

Sejalan dengan tujuan pertama, pembentukan forum purna PMI juga dimaksudkan untuk mengembangkan wadah wirausaha mandiri yang mampu mengangkat produk unggulan daerah sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Upaya untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan ini, juga dilakukan program pendampingan yang dilaksanakan oleh BP3PMI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Masalah yang dihadapi terkait upaya ini adalah kontinuitas program dan pemasaran hasil produksi. Program tidak berjalan secara berkesinambungan dan pemasaran hasil produksi tidak lancar karena masalah jarak dan distribusi dengan pasar.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Forum Purna PMI dan keberhasilannya selama ini, Hj. Noneng sering diminta menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan pelatihan dan pembinaan untuk rintisan wirausaha yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Apa yang disampaikan Hj. Noneng dalam berbagai kesempatan tersebut sebenarnya berbagai pengalaman tentang upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desanya.

Dalam komunikasi pembangunan partisipatif, *opinion leader* menjadi salah satu unsur yang sangat mempengaruhi arus

komunikasi. Berbagai perubahan dan kemajuan akibat pembangunan desa sangat ditentukan kemampuan masyarakat untuk mengantisipasi dan beradaptasi, termasuk keberadaan para *opinion leader*. Misalnya pemimpin opini bisa berperan memotivasi masyarakat agar ikut serta secara aktif dalam pembangunan, untuk itulah selayaknya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pemuka pendapat ini. Bukan sebaliknya malah menjatuhkan *opinion leader* tersebut. Misalnya tentang kepercayaan masyarakat pada program pembangunan, selayaknya pemerintah memfungsikan peran *opinion leader* sebagai tokoh sentral dalam pembangunan di pedesaan.

Dalam penelitian Van de Ban (1963) dalam Roger (1985) di Belanda menemukan fakta bahwa apa yang dilakukan oleh pemuka pendapat cenderung diikuti oleh masyarakat. Pemuka pendapat mempunyai gradasi homofili yang lebih baik dibanding dengan pihak lain. Homofili artinya suatu tingkat dimana pasangan individu yang berinteraksi sepadan dalam hal tertentu, seperti suatu kepercayaan, nilai-nilai, pendidikan dan status sosial. Homofili kebalikan kata dari heterofili. Jika homofili dalam sistem sosial itu tinggi, maka komunikasi akan sangat mudah untuk dilakukan, tapi heterofili suatu interaksi dalam berkomunikasi yang belum mempunyai

dasar dalam bentuk kepercayaan untuk melakukan hal tersebut.

4. Keterlibatan Aparat Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat

Saat ini, Desa Celak di Kecamatan Gununghalu bersama Desa Saguling di Kecamatan Saguling menjadi wilayah percontohan di Kabupaten Bandung Barat untuk program Desa Migran Produktif (Desmigratif) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk program Desmigratif, di Desa Celak terdapat 2 orang tenaga pendamping untuk membina dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekitar 60 purna PMI yang mempunyai usaha mandiri.

Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) merupakan salah satu program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemnakertrans) yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait. Desmigratif bertujuan untuk mencegah terjadinya pengiriman tenaga kerja ilegal ke luar negeri serta memberdayakan masyarakat desa di kantong-kantong kemiskinan yang sumber pengiriman PMI ke luar negeri. Desmigratif merupakan program terobosan Kemnakertrans dalam memberdayakan, meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap calon PMI dan keluarganya,

khususnya di di desa-desa yang menjadi asal PMI

Dalam menjalankan program itu Kemnakertrans bekerja sama dengan tujuh kementerian yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian lain dilibatkan dalam program Desmigratif agar mewujudkan kerja sama yang efektif dan efisien serta didasarkan pada asas saling membantu dan mendukung terlaksananya penyelenggaraan program. Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pertukaran data dan informasi, pembangunan pusat layanan migrasi, penumbuhkembangan usaha produktif desa atau kawasan perdesaan migran produktif berbasis sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Perlindungan PMI harus dilakukan sejak pra, hingga kembali ke daerah asal. PMI harus merasakan pelayanan yang aman, cepat, mudah dan berbiaya murah. Desa Migran Produktif (Desmigratif) juga merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan para stakeholder dalam upaya memperbaiki nasib dan perlindungan masyarakat yang akan

menjadi PMI ke luar negeri maupun yang telah menjadi purna PMI

Ada empat konten kegiatan utama dari program Desmigratif ini, keempatnya saling dukung satu sama lain agar program ini memberikan manfaat kepada masyarakat dan dapat berjalan secara berkesinambungan. Empat kegiatan utama dalam program desmigratif adalah:

- a) Membangun pusat layanan migrasi dimana orang atau warga desa yang hendak berangkat ke luar negeri mendapatkan pelayanan di balai desa melalui peran dari pemerintah desa. Informasi yang didapatkan antara lain informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai bekerja ke luar negeri dan lain-lain termasuk pengurusan dokumen awal.
- b) Kegiatan yang terkait dengan usaha produktif. Ini kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu pasangan dari PMI yang bekerja di luar negeri agar mereka ini memiliki keterampilan dan kemauan untuk membangun usaha-usaha produktif. Kegiatan ini mencakup pelatihan untuk usaha produktif, pendampingan untuk usaha produktif, bantuan sarana produktif hingga pemasarannya.
- c) Kegiatan untuk menangani anak-anak PMI atau anak-anak buruh migran

dalam bentuk *community parenting*. Dengan kegiatan ini anak-anak PMI diasuh bersama-sama oleh masyarakat dalam suatu pusat belajar-mengajar. Dalam konteks ini orang tua dan pasangan yang tinggal di rumah diberikan pelatihan tentang bagaimana membesarkan atau merawat anak secara baik agar mereka ini bisa terus bersekolah mengembangkan kreatifitasnya sesuai dengan masa kanak-kanak mereka.

- d) Penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha. Koperasi usaha produktif ini tentunya juga bisa menjadi inisiatif bersama dari masyarakat yang akan didukung oleh pemerintah.

5. SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Desa Celak Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat merupakan *sendung area* pekerja migran. Tingginya angka migrasi di daerah tersebut didorong tradisi turun temurun dan adanya motif peningkatan kesejahteraan keluarga
2. Partisipasi masyarakat di Desa Celak, khususnya di kalangan purna PMI, dalam pembangunan desa sudah baik. Hal ini

bisa dilihat dari adanya Forum Purna PMI yang mempunyai berbagai aktivitas yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus mengangkat potensi-potensi unggulan wilayah.

3. Keberadaan tokoh masyarakat setempat sebagai *opinion leader* memegang peranan yang sangat signifikan dalam mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran sehingga bisa mengantisipasi dan beradaptasi dengan dinamika dan perubahan yang terjadi sebagai akibat kegiatan pembangunan di desa.
4. Intervensi dari pemerintah masih dibutuhkan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, berkenaan dengan kesinambungan berbagai program. Dalam implementasinya, sebaiknya masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif secara langsung dari mulai merencanakan, melaksanakan sampai mengevaluasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anyaegbunam, C., P. Mefalopulos, and T. Moetsabi. 2004. *Participatory Rural Communication Appraisal: Starting With The People*. SADC Centre of Communication for Development, Rome.
- Dhak, B. 2014. Food security act, 2013: Opportunities and challenges for the Backward States in India. *Journal of Rural Development*. 33(4), 475 – 491
- Dilla, Sumadi. 2007. *Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media.
- Melkote, S.R., and Steeves, H.L. 2006. *Communication for Development in The Third World: Theory and Practice for Empowerment*. 2nd Edition. London and New Delhi: Sage Publication and Thousand Oaks
- Mulyana, Deddy 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- _____. 2007. *Membangun Komunikasi Pembangunan yang Humanistik [Kata Pengantar]*. Di dalam Dilla S, penulis. *Komunikasi Pembangunan : Pendekatan Terpadu*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Mulyana, Slamet, 2015. *Konstruksi Realitas Sosial Buruh Migran Perempuan*. Disertasi. Universitas Padjadjaran
- Ndraha, Taliziduhu. 1981. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Di Beberapa Desa*. Jakarta : yayasan Karya Dharma
- Anyaegbunam, C., P. Mefalopulos, and T. Moetsabi. 2004. *Participatory Rural Communication Appraisal: Starting With The People*. SADC Centre of Communication for Development, Rome.
- Rangkuti, P.A. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Mekanisasi Pertanian*. Bogor: IPB Pers
- Rogers, E.M. 1976. *Perspektif Baru dalam Komunikasi dan Pembangunan : Suatu Tinjauan dalam Komunikasi dan Pembangunan Perspektif Kritis*, Dasmarn N, penerjemah. 1985. Jakarta: LP3ES. Terjemahan dari *Communication and Development : Critical Perspectives*
- Sulistiyowati, F., Setyowati, Y., & Wuryantoro, T. (2005). *Komunikasi Pemberdayaan*. Yogyakarta: APMD Press
- Syahyuti. 2006. *Tiga Puluh Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Bina Rena Pariwara. Jakarta
- Totok Mardikanto. 2010. *Pembangunan Komunikasi*. Sukoharjo: Sebelas Maret University Press
- Valentin, E.K. (2005). Away With SWOT Analysis: Use defensive or offensive evaluation instead. *The Journal of Applied Business Research*. 21(2), 91-105
- Wahyuni, S. (2012). *Proses Komunikasi dan Partisipasi dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Kasus Program Raksa Desa di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor)*. Tesis. IPB Bogor
- Wulan, T.R. (2010). *Pengetahuan dan Kekuasaan : Penguatan Remitan Sosial sebagai Strategi Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan*. Disertasi. IPB Bogor
- Zulkarimen Nasution. 2000. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Edisi Revisi. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.